

Surat Kabar : Kompas
Subyek : Tambang

Edisi : 19 Maret 2013
Halaman : 24

PERTAMBANGAN

Polisi Hentikan Penambangan Bauksit Tak Berizin

Batam, Kompas - Polisi menghentikan sejumlah aktivitas tambang bauksit di kawasan Bintan dan Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, baru-baru ini. Selain diduga tak berizin, penghentian penambangan juga karena aktivitas dilakukan di luar izin yang diberikan.

Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (Kepri) Brigadir Jenderal (Pol) Yotje Mende mengatakan, lokasi penambangan yang dihentikan tersebar di tiga titik. Dua lokasi berada di Tanjung Pinang, yaitu di Kota Piring dan Pulau Dompok. Satu lokasi lagi di Bintan, yaitu di Pulau Koyang. "(Lokasi tambang) Sudah disegel oleh kepolisian resor setempat," ujarnya, Senin (18/3), di Batam, Kepri.

Menurut Yotje, penambangan di Kota Piring dihentikan karena lokasi sebenarnya tidak diperuntukkan aktivitas tambang. Bahkan, diduga penambangan telah merusak situs cagar budaya peninggalan Kerajaan Melayu. Adapun penghentian tambang di Dompok dan Koyang karena izin yang dimiliki perusahaan dinilai masih tidak lengkap.

"Diduga pengusaha pemilik izin usaha penambangan tak menambang, tetapi menunjuk petambang lainnya yang hasil tambangnya kemudian dibeli lagi. Praktik seperti itu sebenarnya tak boleh. Apalagi, ada dugaan petambang juga menambang di luar wilayah kerjanya," paparnya.

Meskipun lokasi sudah disegel, warga di sekitar Pulau Koyang masih melihat aktivitas tambang. "Kami dengar karena pemilik tambang orang-orang penting. Ada pengusaha Jakarta, pengurus partai, dan anggota DPRD Kepri," kata Aris Rahman, warga Pulau Koyang.

Bahkan, tambah Gunardi, warga lainnya di Pulau Koyang, pengusaha diduga juga memberikan setoran kepada sejumlah pihak terkait dengan aktivitas tambang.

Tudingan Gunardi tersebut tidak dibantah oleh Lip, pekerja di perusahaan bauksit tersebut, saat dihubungi Kompas.

Tambang besi didemo

Di Tasikmalaya, Jawa Barat, ratusan warga berunjuk rasa menolak penambangan pasir besi. Mereka mendesak pemerintah kabupaten segera mencabut izin penambangan tersebut. Sebab, lokasi tambang pasir besi itu dinilai merugikan masyarakat dan lingkungan.

"Kami menolak penambangan pasir besi di desa kami," kata koordinator aksi, Asep Hersan, di sela-sela aksi.

Data Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tasikmalaya menyebutkan, kandungan pasir besi di kabupaten tersebut mencapai sekitar 6,6 juta ton yang sudah ditambang sejak tahun 2007. (RAZ/CHE)